

PEMIKIRAN KONTEMPORER PENDIDIKAN ISLAM

Oleh : JULI AMALIYA NASUCHA
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim
juliamaliyanasucha@gmail.com

Abstrak:

Sejak dua dasawarsa menjelang millennium, globalisasi telah memunculkan wacana baru dalam berbagai lapangan kehidupan: literature akademik, media massa, forum-forum seminar, diskusi, dan pembahasan dalam berbagai lembaga. Globalisasi mencoba memberikan perubahan-perubahan dalam struktural dalam seluruh kehidupan Negara bangsa yang mempengaruhi fundamen-fundamen dasar pengaturan hubungan antar manusia, organisasi-organisasi sosial, dan pandangan-pandangan dunia. Perubahan besar dalam lapangan ekonomi dan politik menimbulkan perubahan-perubahan besar dalam bidang pendidikan baik pada tingkat internasional maupun nasional dan lokal. Terdapat reorientasi pendidikan baik pada tingkat kelembagaan, kurikulum, maupun manajemen sesuai dengan perkembangan-perkembangan baru yang terjadi dalam proses globalisasi. Artikel ini mencoba menelusuri perubahan suatu sistem telah ada pada suatu masa, terdapat ragam “aliran-aliran modern dalam Islam” dan “Islam dan modernisasi”. Modernisme menandakan akan keberadaan pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, berada pada suasana baru.

Kata Kunci: *Kontemporer, Globalisasi, Pendidikan Islam, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Proses “globalisasi” terus menemukan momentumnya sejak dua dasawarsa menjelang milenium baru telah memunculkan wacana baru dalam berbagai lapangan kehidupan: literature akademik, media massa, forum-forum seminar, diskusi, dan pembahasan dalam berbagai lembaga. “Globalisasi” adalah kata yang digunakan untuk mengacu kepada “bersatunya” berbagai Negara dalam globe

menjadi satu entitas. Secara *istilahi* “globalisasi” berarti perubahan-perubahan dalam struktural dalam seluruh kehidupan Negara bangsa yang mempengaruhi fundamen-fundamen dasar pengaturan hubungan antar manusia, organisasi-organisasi sosial, dan pandangan-pandangan dunia.

Perubahan-perubahan struktural dan perkembangan yang mendorong momentum bagi globalisasi tidak ragu lagi bermula

dalam lapangan ekonomi dan teknologi, yang segera mengimbas ke dalam bidang politik, sosial, budaya, gaya hidup, dan lain-lain. Sejumlah perubahan struktural dan perkembangan utama tersebut antara lain: *pertama*, pertumbuhan yang cepat dalam perdagangan internasional dan keuangan yang pada gilirannya meningkatkan ketergantungan antarnegara, yang pada dasarnya dikuasai perusahaan-perusahaan multinasional (Multi National Corporations/MNCS) yang terus semakin menguat. *Kedua*, peningkatan utang dan ketergantungan Negara-negara berkembang – yang sebagian besar merupakan Negara-negara muslim - pada pasar keuangan internasional. *Ketiga*, meningkatnya peranan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan internasional seperti IMF, World Bank, WTO, dan lain-lain dalam menentukan kebijakan dan program ekonomi, sosial dan politik Negara-negara berkembang. *Keempat*, pesatnya kemauan teknologi telekomunikasi dan transportasi, yang memungkinkan terjadinya penyebaran informasi dan nilai-nilai secara global dengan

menciutkan jarak dan waktu. *Kelima*, berakhirnya perang dingin dan bangkitnya demokrasi liberal (Burhanuddin & Afrianty, 2006).

Kelima perubahan besar dalam lapangan ekonomi dan politik diatas mau tidak mau menimbulkan perubahan-perubahan dalam besar dalam bidang pendidikan baik pada tingkat internasional maupun nasional dan lokal. Pada tingkat internasional, terjadi reorientasi pendidikan baik pada tingkat kelembagaan, kurikulum, maupun manajemen sesuai dengan perkembangan-perkembangan baru yang terjadi dalam proses globalisasi. Reorientasi itu mencakup antara lain : pengembangan kurikulum, yang lebih sesuai dengan *knowlwdge – based economy*, HAM, demokratisasi dan multikulturalisme; kelembagaan yang lebih otonom melalui privatisasi dan penyertaan dunia industri dan masyarakat luas; dan manajemen yang mengarah kepada sistem, proses, nilai-nilai, dan budaya “*corporate good governance*”.

Pada tingkat nasional, respon dunia pendidikan terhadap globalisasi telah menjadi wacana

sejak awal 1990-an. Dalam rumusan “arah pandangan dasar pendidikan nasional” yang tercakup dalam paradigma baru pendidikan nasional itu dikemukakan 10 kerangka acuan, antara lain: Pendidikan dengan prinsip global. Pendidikan harus mampu berperan dan menyiapkan peserta didik dalam konstalasi masyarakat global.

Pada akhirnya berbagai kecenderungan perkembangan baru pendidikan yang muncul sebagai dampak atau konsekuensi globalisasi mesti diadopsi sistem pendidikan nasional. Secara ringkas, kenyataan ini tercermin dalam rumusan paradigma baru pendidikan nasional yang mencakup arah sebagai berikut: desentralistik (otonom); orientasi pendidikan holistik untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya (multikulturalisme), menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum; peningkatan peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif; dan pemberdayaan institusi masyarakat-keluarga, LSM, pesantren, lembaga-

lembaga pendidikan lainnya, dan dunia usaha.

Selanjutnya paradigma baru pendidikan nasional itu menggariskan prinsip-prinsip yang terkandung dalam arah baru pengembangan pendidikan nasional, yaitu: (1) Kesetaraan perlakuan sektor pendidikan dengan sektor lain; (2) Pendidikan berorientasi rekonstruksi sosial; (3) Pendidikan dalam rangka pemberdayaan bangsa; (4) Pemberdayaan infrastruktur sosial untuk kemajuan pendidikan nasional; (5) Pembentukan kemandirian dan keberdayaan untuk mencapai keunggulan; (6) Penciptaan iklim yang kondusif untuk tumbuhnya toleransi dan konsensus dalam kemajemukan; (7) Perencanaan terpadu secara horizontal (antarsektor) dan vertikal (antarjenjang); (8) Pendidikan berorientasi peserta didik; (9) pendidikan multikultural; (10) Pendidikan dengan perspektif global (Burhanuddin & Afrianty, 2006).

Dengan terjadinya perubahan-perubahan kebijakan dan politik pendidikan sejak 1970-an dan peluang-peluang baru seperti diisyaratkan dalam paradigma baru

pendidikan nasional, seperti dikemukakan diatas, kini lembaga-lembaga pendidikan islam memiliki peluang dan sekaligus tantangan berkenaan dengan jenis dan model pendidikan yang dapat dipilih dan diselenggarakan, yang setidaknya ada empat pilihan: 1. Pendidikan yang berpusat pada *tafaqquh fi al-din*, seperti yang ada dalam tradisi pesantren pada masa pramodernisasi (pesantren salafiyah), dengan kurikulum yang sepenuhnya ilmu agama. 2. Pendidikan madrasah yang mengikuti kurikulum Diknas dan Depag. 3. Sekolah islam “plus” atau “unggulan” yang mengikuti kurikulum Diknas, yang pada dasarnya adalah “pendidikan umum plus agama”. 4. Pendidikan keterampilan, apakah mengikuti model “STM” atau MA/SMU keterampilan.

Keempat jenis pilihan ini secara implisit mengakomodasi hampir keseluruhan harapan masyarakat secara sekaligus kepada pendidikan islam. Harapan pertama dan utama adalah agar lembaga-lembaga pendidikan islam secara keseluruhan tetap menjalankan peran sangat krusial dalam tiga hal pokok:

pertama, transmisi ilmu-ilmu dan pengetahuan islam. *Kedua*, pemeliharaan tradisi islam. *Ketiga*, reproduksi calon-calon ulama. Harapan kedua adalah agar para peserta didik tidak hanya mengetahui ilmu agama, tetapi juga ilmu umum-atau sebaliknya tidak hanya menguasai pengetahuan umum, tetapi juga unggul dalam ilmu agama-dan dengan demikian dapat melakukan mobilitas pendidikan. Dan harapan ketiga adalah agar para anak didik memiliki keterampilan, keahlian atau *lifeskills*, khususnya dalam bidang-bidang sains dan teknologi yang menjadi karakter dan ciri masa globalisasi - yang pada gilirannya membuat mereka memiliki dasar-dasar “*competitive advantage*” dalam lapangan kerja, sebagaimana dituntut di alam globalisasi.

Berkaitan dengan peran pendidikan islam, Lebih lanjut makalah ini akan membahasnya dalam tema pemikiran kontemporer pendidikan islam: Modernisasi pendidikan islam, demokratisasi pendidikan islam, civil society dan pendidikan islam, dan multikultural dalam pendidikan islam.

PEMBAHASAN

A. Modernisasi Pendidikan Islam

1. Definisi dan Seputar Modernisasi Pendidikan Islam

Modernisasi mengandung pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham, adat istiadat, institusi lama dan sebagainya, agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan baru yang timbul oleh kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Kata modernisasi bersumber dari barat, dalam bahasa Arab modernisasi diterjemahkan menjadi *tajdid*. Modernisasi atau pembaruan juga berarti proses pergeseran sikap dan mentalitas mental sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan hidup masa kini (Indonesia, 2008). Jadi modernisasi pendidikan islam adalah proses penyesuaian pendidikan islam dengan kemajuan zaman.

Menurut Ibn Taimiyah, dalam Yusran Asmuni, secara umum pembaruan dalam islam timbul karena :

a. Membudayanya khurafat di kalangan kaum muslimin.

- b. Kejumudan atau ditutupnya pintu ijtihad dianggap telah membodohkan umat islam.
- c. Terpecahnya persatuan umat islam sehingga sulit membangun dan maju.
- d. Kontak antara barat dengan islam telah menyadarkan kaum muslimin akan kemunduran (Asmuni, 1998).

Ijtihad biasa dipakai dalam ushul fikih dan tak jarang pula dipakai dalam pemikiran islam lainnya, yang pengertiannya mengacu kepada pengerahan kemampuan intelektual secara optimal untuk mendapatkan suatu solusi hukum atau untuk mendapatkan suatu pengetahuan (Rusli, 1999).

Ijtihad menurut Ibn Taimiyah boleh dilakukan. Ijtihad menurut beliau harus dikobarkan dan digalakkan lagi. Ijtihad merupakan satu-satunya pintu untuk mengembangkan berbagai bidang keilmuan, baik fikih, tafsir termasuk pendidikan. Hal ini adalah semata-mata untuk kemaslahatan dan kemajuan umat islam sendiri untuk mengejar

ketertinggalannya dengan orang-orang non islam.

Pola-pola pembaruan dalam islam, khususnya dalam pendidikan mengambil tempat sebagai :

- a. Golongan yang berorientasi pada pola pendidikan modern barat.
- b. Gerakan pendidikan islam yang berorientasi pada sumber islam yang murni.
- c. Pembaruan pendidikan yang berorientasi pada nasionalisme.

2. Bentuk modernisasi Lembaga pendidikan islam

Saat ini sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan islam yang berkualitas dan setidaknya dapat memenuhi kebutuhan bagi pendidikan masyarakat muslim sesuai dengan tuntutan abad modernisasi, diantaranya:

1. Al-Azhar

Universitas al-Azhar yang paling terkenal di dunia islam, berada di Kairo Mesir. Universitas ini didirikan oleh Jenderal Jauhar, setelah pendirian kota Kairo tahun 358 H/969 M. semula ia merupakan lembaga Fatimiyah sebagai pusat latihan kader penyebar ideology

Syi'ah mengancam otoritas Abbasiyah Sunni. Maka dinasti Saljuk Abbasiyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan teologi ortodoks sebagai upaya mengimbangi upaya al-Azhar (Mukaromah, 2018). Demikianlah Nizamul Mulk mendirikan beberapa madrasah nizamiyah di Irak dan Syria. Sementara itu Sultan Salahuddin dan beberapa Sultan di Syria lainnya mendirikan sejumlah madrasah di Syria dan Palestina. Dengan demikian al-Azhar memiliki peranan penting dalam mendorong pendidikan tinggi di dalam islam.

Perkembangan al-Azhar pada zaman modern, sebelum tahun 1872, ijazah yang diberikan kepada anak didik al-Azhar tidak melalui ujian, tetapi diberikan atas keputusan pribadi dan masing-masing guru, berdasarkan system pendidikan yang diatur sebagai berikut, (1) Untuk mata kuliah tertentu terdapat satu guru besar. Mahasiswa berusaha mendampingi guru besar hingga guru besar meninggal dunia. Tujuannya untuk mencapai tingkat ketinggian ilmiah seperti yang dimiliki gurunya. (2) Mahasiswa dapat memperoleh ijazah untuk mata kuliah tertentu,

sedangkan mata kuliah lain ditunda. Mahasiswa dapat menjadi guru pada mata kuliah yang telah lulus dan menjadi murid pada mata kuliah yang belum lulus. (3) Setiap mahasiswa yang merasa memiliki kemampuan untuk mata kuliah tertentu diberikan kesempatan untuk mengajarkannya dan bila ia dapat berfatwa dalam kaitan dengan ilmu yang bersangkutan, maka ia berhak memperoleh ijazah. (4) setiap mahasiswa dibebaskan memilih mata kuliah yang diminatinya tanpa terkait dengan daftar kehadiran (Nata, 2004).

Pengembangan al-Azhar selanjutnya pada masa kepemimpinan Syaikh Muhammad Abbasi Al Mahdi Al-Hanafi, rektor al-Azhar ke-21. Diantara pembaharuan yang dilakukannya adalah pada bulan Februari 1872 memasukkan sistem ujian untuk mendapatkan ijazah al-Azhar. Calon *Alim* harus berhadapan dengan suatu tim yang beranggotakan 6 orang syaikh yang ditunjuk oleh syaikh al-Azhar, untuk menguji bidang studi ushul, fiqih, tauhid, hadis, tafsir, dan ilmu-ilmu bahasa seperti nahwu, saraf, ma'ani, bayan, badi', dan

mantik. Kandidat yang berhasil lulus berhak mendapatkan *al-Syahadah al-'alamiyah* (ijazah kesarjanaaan).

Pada bulan Maret 1885 keluar undang-undang mengenai pengaturan tenaga pengajar di al-Azhar. Seseorang dapat menjadi tenaga pengajar setelah ia dapat menyelesaikan buku-buku induk dalam 12 bidang studi seperti tersebut diatas. Kandidat yang lulus dalam uluai ini mendapat *ad-darajah al-Ulya* (tingkat pertama), *ad-darajah al saniyah* (tingkat kedua), *al-darajah al-salisah* (tingkat ketiga). Lulusan nilai pertama dapat bekerja sebagai pengajar untuk buku-buku tingkatan tinggi; nilai kedua untuk buku-buku tingkatan menengah; dan nilai ketiga untruk buku-buku tingkatan dasar.

Pada tahun 1896, pertama kali dibentuklah idarah al-Azhar (dewan adminidtrasi al-Azhar). Tugas utamanya adalah mengeluarkan peraturan yang membagi masa belajar di al-Azhar menjadi dua periode : pendidikan dasar (*al-syahadah al-ahliyah*/ijazah kualifikasi) dan pendidikan Menengah dan Tinggi (*al-syahadah*

al-'alamiyah). Masa belajar untuk periode pertama 8 tahun dan periode kedua 6 tahun.

Usaha pembaruan selanjutnya dilakukan oleh Syaikh Muhammad Abduh (1849-1905). Pada mulanya tokoh pembaru ini mendapat tantangan dari ulama konservatif, tetapi setelah al-Azhar di pegang oleh Syaikh Al-Nawawi (teman akrabnya), ia kesempatan mengadakan sedikit pembaruan. Berangsur-angsur ia mulai melakukan pengaturan libur yang pendek dan masa belajar lebih panjang. Sementara itu, ia juga memasukkan kurikulum modern, seperti fisika, ilmu pasti, filsafat, sosiologi, dan sejarah ke al-Azhar. Di samping masjid, didirikan Dewan Administrasi al-Azhar dan diangkat beberapa orang sekretaris untuk membantu kelancaran tugas Syaikh al-Azhar. Bersamaan ini juga dibangun oleh Rauq al-Azhar yang dapat memenuhi kebutuhan pemondokan bagi guru-guru dan mahasiswa-mahasiswanya.

Tahun 1908, jenjang pendidikan al-Azhar menjadi tiga: (1) Pendidikan Dasar, (2)

Pendidikan Menengah, (3) Pendidikan Tinggi. Tahun 1911 keluar undang-undang yang menyatakan setiap jenjang pendidikan berdurasi 5 tahun. Tahun 1930, jenjang pendidikan disempurnakan menjadi empat, (1) Pendidikan Rendah selama 4 tahun, (2) Pendidikan Menengah selama 5 tahun, (3) Pendidikan Tinggi selama 4 tahun; (4) Pendidikan Tinggi Keterampilan selama 5 tahun. Fakultas-fakultas yang ada pada waktu itu adalah *ushuluddin*, *syari'ah*, dan bahasa Arab. Semenjak inilah al-Azhar yang dulunya masjid berubah menjadi universitas.

Pada masa kepemimpinan Syaikh Mahmud Syaltut, rector al-Azhar ke-41 dibentuk organisasi untuk mengatur "pemeliharaan al-qur'an" dan lahir fakultas-fakultas baru antara lain: fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik.

Adapun respon masyarakat terhadap al-Azhar adalah semakin banyaknya umat Islam yang menuntut ilmu di al-Azhar, bukan saja dari Mesir, bahkan dari seluruh dunia. Pengaruh lembaga ini tentu

dapat kita rasakan bagaimana ilmuwan-ilmuan banyak lahir dari al-azhar dan ilmupun berkembang sampai ke kita banyak melalui ulama-ulama tersebut.

2. Muslim modernis dan Sekolah Madania (Pendidikan Islam di Indonesia)

Lembaga-lembaga pendidikan islam yang klasikal sampai tahun 1930 hanya mengajarkan pelajaran agama, kecuali sebagian kecil saja. Mulai dari tahun 1931, lembaga pendidikan islam di Indonesia memasuki warna baru yang oleh Mahmud Yunus disebut tahun dimana dimulainya modernisasi pendidikan Islam di Indonesia (Yunus, 1995). Hal ini ditandai dengan adanya Normal Islam (Kulliah Mu'allimin Islamiyah / KMI) di Padang yang dipimpin oleh Mahmud Yunus tahun 1931. Normal Islam KMI yang didirikan oleh Persatuan Guru-guru Agama Islam (PGAI) termasuk lembaga pendidikan modern yang banyak berpengaruh pada perkembangan pendidikan islam "modern" di Indonesia. Salah satu alumninya K.H. Imam Zarkasyi Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor

Ponorogo Jawa Timur yang masih kokoh hingga saat ini. Dan lembaga pendidikan islam yang pertama kali memasukkan pendidikan umum menjadi kurikulum sekolah adalah al-Jami'ah Islamiyah di Sungayang Batu Sangkar. Lembaga ini didirikan oleh Mahmud Yunus Maret 1931. Pengetahuan umum yang dipelajari meliputi: berhitung dagang, aljabar, ilmu ukur, ilmu alam/kimia, ilmu hayat/geologi, ekonomi, mengarang buku, sejarah dunia/islam, ilmu bumi/falak, tata Negara, bahasa inggris/belanda. Selain ilmu umum ada jugailmu mendidik dan mengajar, ilmu jiwa, dan ilmu kesehatan.

Hadirnya lembaga pendidikan islam modern, baik pesantren atau nonpesantren, telah mendapat respon berbeda. Kaum yang fanatik dengan tradisionalisme pesantren menuduh lembaga pendidikan modern ini sebagai lembaga pendidikan umum, sebab tidak mempelajari kitab-kitab kuning sebagai dasar ilmu. Adapun yang merespon positif melihat dari perspektif lowongan kerja. Mereka berpendapat pembaruan ini sebagai

langkah maju dan relevan dengan tuntutan zaman.

Lebih lanjut, Imam Zarkasyi mengatakan, pengaruh pembaruan pada masa ini terhadap masyarakat, yakni wawasan keislaman umat islam semakin luas, pola pikir semakin rasional, alumni pesantren dapat melanjutkan pendidikan ke universitas baik dalam maupun luar negeri.

Modernisasi pendidikan islam (baik madrasah, pesantren, atau sekolah) sudah menjadi keharusan sejarah. Sejak dasawarsa terakhir abad 20, muncullah sekolah-sekolah islam swasta yang dalam perkembangannya disebut sebagai “sekolah islam plus”, “sekolah islam unggulan”, dan bahkan “sekolah elit Islam/Muslim”, seperti Sekolah Islam al-Azhar, al-Izhar, Muthahhari, Insan Cendekia, Dwiwarna, Sekolah Madania, dan banyak lagi.

Sekolah-sekolah islam ini disebut “elite” atau “plus”, atau “unggulan” karena beberapa alasan: *pertama*, sekolah-sekolah ini menerima siswa-siswanya secara sangat kompetitif, baik dari segi kemampuan akademis maupun

keuangan; *kedua*, guru-guru yang mengajar juga diterima melalui penyaringan dan seleksi yang sangat kompetitif; *ketiga*, sekolah-sekolah ini memiliki berbagai prasarana dan sarana pendidikan yang jauh lebih baik dan lebih lengkap dibandingkan sekolah-sekolah negeri lainnya. Dengan berbagai latar belakang seperti ini, tidak heran, kalau kemudian para siswanya juga memiliki kualitas lebih baik dan lebih unggul. Salah satu “Sekolah Islam Unggulan” di Indonesia yang cukup menarik perhatian adalah konsep Muslim Modernis dan Sekolah Madania (Burhanuddin & Afrianty, 2006).

Kelompok ini lebih banyak menekuni kajian humaniora dan ilmu sosial. Mereka berusaha menjembatani Islam dengan kebudayaan lain dengan bahasa kajian yang meraka akrabi. Mereka juga terbiasa meminjam khazanah pengalaman tradisi dan keilmuan Barat sebagai pisau analisis bagi pemecahan masalah-maslah yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat, atau menjadikan sebagian pengalaman atau kemajuan bangsa barat sebagai bagian dari

mengambil pelajaran atau *ibrah* untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin.

Bagi kelompok ini, interaksi antara kebudayaan dan peradaban merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan karenanya setiap kelompok harus menghargai dan mengakui eksistensi kelompok lain. Bagi mereka, Islam bukanlah melulu agama yang berorientasi sebatas nilai-nilai ketuhanan (*theological values*) yang mengikat secara universal tetapi bersifat impersonal, melainkan juga modal cultural (*cultural capital*) yang sifatnya adaptatif merespon persoalan yang berkembang ditengah masyarakat.

Laboratorium eksperimen pendidikan yang mewakili cara pandang kaum modernis ini adalah Sekolah Madania yang berada dibawah Yayasan Madania. Institusi yang ini didirikan tahun 1996 ini memang sangat dekat dengan Paramadina, sebuah kelompok atau forum studi yang berkenaan dengan sosial keagamaan di Bilangan Pondok Indah Jakarta Selatan, dan Paramadina selalu diasosiasikan dengan Nurcholis Madjid alumni

Pondok Modern Gontor yang mendapat gelar doctoral dari Universitas Chicago (Burhanuddin & Afrianty, 2006). Menurutnya, Islam harus diterjemahkan dalam budaya pluralis, menghargai kebebasan dan demokrasi serta menyemai budaya kesantunan, bukan kekerasan. Karena itu, tujuan pembentukan masyarakat Islam, sebagaimana pernah dilakukan Nabi SAW. di Madinah, adalah masyarakat madani, yang dapat diterjemahkan sebagai *civil society*. Bagi Cak Nur, panggilan beliau, ide-ide *civil society* atau masyarakat madani juga inheren dalam tradisi khazanah peradaban Islam sejak zaman lampau.

Dalam kerangka inilah sekolah Madania didirikan, yakni antara lain untuk menanamkan budaya plural dan penghargaan terhadap perbedaan. Di Madania setiap individu diperlakukan istimewa dan memperoleh pelayanan dan penghargaan yang sama. Filosofinya adalah karena Tuhan telah menganugrahkan manusia derajat dan hak yang sama, sekalipun dengan potensi, minat dan pertumbuhan pribadi yang berbeda-beda. Karena itu, lembaga ini

berusaha memberikan fasilitas dan bimbingan pertumbuhan intelegensi siswa secara utuh, sehingga ukuran keberhasilan anak didik tidak diukur secara seragam, melainkan sesuai dengan potensi dan minat masing-masing. Yang penting disini adalah pendidikan karakter dan *life skills* sebagai bekal bagi para murid dalam kehidupan mendatang.

Madania dikenal sebagai lembaga yang mengedepankan tradisi pluralisme dan multikulturalisme. Karena itu lembaga ini juga membolehkan non-muslim untuk diterima sebagai murid. Sekitar 3% dari total populasi murid di Madania adalah non-muslim. Lembaga ini juga menyiapkan pelajaran agama bagi murid non-muslim setiap minggu dengan menghadirkan para guru untuk agama-agama tersebut. Hal ini menjadi fenomena yang biasa di sekolah-sekolah umum negeri atau swasta, namun tentu saja sangat unik dan langka untuk lembaga yang berafiliasi dengan masyarakat muslim.

Kurikulum yang diadopsi Madania mengikuti ketentuan yang digariskan secara Nasional oleh

Departemen Pendidikan Nasional yang telah dikembangkan dan diperkaya antara lain untuk pengembangan *life skills* murid pengembangan seperti *emotional intelligent* (EI), *spiritual intelligent* (SI), dan integrasi lain serta keterampilan seperti menulis dan membaca dalam bahasa Inggris. Dengan suasana belajar dikondisikan nyaman (*fun and enjoyable*), kurikulum terpadu ini diterapkan agar siswa memiliki kecakapan untuk saling menghubungkan antara satu pelajaran dengan yang lain dan mampu mengaitkan dengan pengalaman hidup sehari-hari karena sesungguhnya sifat ilmu itu saling berkait (Tamin AR et al., 2018).

Bagi Madania, kurikulum yang dikembangkan mengarah pada pengenalan dan pelatihan untuk terampil memberikan apresiasi dan pemahaman budaya global. Oleh sebab itu pembiasaan membaca dan berbicara dengan bahasa Inggris dan bahasa asing lain bagi siswa menjadi sangat vital.

A. Demokratisasi Pendidikan Islam

Manusia adalah makhluk multidimensional yang dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang. Manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah aspek kerohaniannya. Manusia akan menjadi sungguh-sungguh manusia kalau ia mengembangkan nilai-nilai rohani (nilai-nilai budaya), yang meliputi: nilai pengetahuan, keagamaan, kesenian, ekonomi, kemasyarakatan dan politik.

Pendidikan Islam sebagai salah satu agen perubahan sosial juga harus mampu menerjang problem yang bergerak dinamis dan proaktif untuk kemajuan dan perbaikan umat Islam. Pendidikan yang dipandang kurang humanis juga sering terjadi dalam proses pendidikan yang berdampak pada perkembangan peserta didik.

Demokratisasi pendidikan dianggap mampu sebagai solusi dalam mewujudkan pendidikan Islam yang humanis. Pendidikan yang tidak membenarkan adanya intimidasi,

pengekangan dan pembatasan terhadap kreatifitas guru dan murid dapat diwujudkan dengan upaya dalam menciptakan demokrasi pendidikan ditandai dengan adanya proses belajar-mengajar yang terbuka dan penuh dialog yang sehat dan bertanggungjawab antara guru dan murid. Suasana humanis dalam pendidikan akan mengantarkan tercapainya tujuan pendidikan Islam. Demokrasi pendidikan ditandai dengan adanya proses belajar-mengajar yang terbuka dan penuh dialog yang sehat dan bertanggungjawab antara pendidik dan peserta didik. Demokratisasi yang dibangun oleh pemikir pendidikan Islam di Indonesia merupakan upaya untuk membangun dasar-dasar persamaan, kebebasan, keadilan, keterbukaan, dan antidiskriminasi.

Gagasan demokratisasi pendidikan islam ini, sebagaimana pendapat Al-Qabisi yang menakjubkan adalah anak-anak yang masuk di Al-Kuttab tidak ada perbedaaan derajat atau martabat. Baginya pendidikan adalah hak semua orang tanpa ada pengecualian. Ia menghendaki pendidikan anak-

anak muslim dilaksanakan dalam satu tempat, dan memperoleh pengetahuan dari pendidik (guru) yang satu. Seorang guru benar-benar harus menjaga sikap untuk tidak membeda-bedakan antara anak orang kaya dan miskin dalam mengajarnya, dan mempersamakan kedudukan orang kaya dan fakir miskin dalam lembaga Pendidikan (Wajdi, 2015). Inilah ajakan Al-Qabisi terhadap demokratisasi pendidikan. Adapun terhadap siswa laki-laki dan perempuan, Al-Qabisi memberikan pandangan yakni anjuran agar mendidik/ mengajar siswa perempuan sama persisnya dengan pendidikan siswa laki-laki dengan syarat memisah tempat.

B. Civil Society dan Pendidikan Islam

Istilah *civil society* – diterjemahkan sebagai “masyarakat sipil”, “masyarakat madani”, “masyarakat warga” atau “masyarakat kewargaan” (Prasetyo & Munhanif, 2002). Konsep *Civil Society* ini lahir pada abad ke-17 sezaman dengan lahirnya Liberalisme politik dan agama di Eropa Barat.

Nurcholis Madjid mengemukakan konsep *civil society* dengan mengajukan istilah ‘masyarakat madani’. Masyarakat ini merujuk kepada masyarakat di Madinah yang dibentuk Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, masyarakat ini dibangun atas asas yang tertuang di dalam “Piagam Madinah”, yang memiliki memiliki 6 (enam) ciri utama yaitu egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan kesukuan, keturunan, ras dan sebagainya), keterbukaan (partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif), penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme serta musyawarah. Dan dalam hubungannya dengan institusi pendidikan islam sebagaimana telah diwujudkan dalam kurikulum sekolah Madania.

C. Multikultural dalam Pendidikan Islam

Akar kata Multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, *multikulturalisme* dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham) (Suryadi & Tilaar.,

1994). Dari kata ini terkandung sebuah pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.

Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pendidikan merupakan wahana yang paling tepat untuk membangun kesadaran multikulturalisme. Pendidikan menurut Prof. Langeveld, pakar pendidikan dari Belanda, dalam bukunya Burhanuddin Salam, mendefinisikan sebagai suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan (Salam, 2002).

Pendidikan multikultural dapat dirumuskan sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia serta

pengurangan atau penghapusan berbagai jenis prasangka atau prejudice untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju. Pendidikan multikultural juga dapat diartikan sebagai strategi untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya. Menurut Muhaemin el Ma'hadi, dalam bukunya Choirul Mahfud, pendidikan multikultural diartikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (Mahfud, 2013). Kurikulumnya mencakup subjek-subjek seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan etno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, multikulturalisme, dan subjek lain yang relevan (Baidhawiy, 2014). Pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan.

Pendidikan islam berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah. Namun sistem pendidikan islam selalu mengaitkan pola dan

sistem pendidikan umum. Tujuan pendidikan islam adalah membentuk kepribadian muslim yang berakhlak mulia. Hal ini, terkait juga didalamnya hubungan antar kawasan dan antar etnis serta kelompok masyarakat yang acap kali berlatarbelakang keagamaan berbeda menimbulkan gejala baru yang memerlukan pendekatan baru dalam apa yang belakangan ini populer dalam wacana multikulturalisme (Mul Khan, 2005). Konsep Multikultural dalam pendidikan islam sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-hujurat ayat 13 (Nata, 2016), yang artinya : “ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal ”.

Berdasarkan ayat tersebut semakin jelas, bahwasanya islam sejak awal telah menjelaskan

berbagai perbedaan baik suku, budaya, bangsa dan sebagainya, dan proses penyatuannya adalah dengan cara saling mengenal antara satu dengan yang lain.

KESIMPULAN

Globalisasi membawa perubahan besar dalam lapangan ekonomi dan politik sehingga menimbulkan perubahan-perubahan dalam besar dalam bidang pendidikan baik pada tingkat internasional maupun nasional dan lokal. Pada tingkat internasional, terjadi reorientasi pendidikan baik pada tingkat kelembagaan, kurikulum, maupun manajemen sesuai dengan perkembangan-perkembangan baru yang terjadi dalam proses globalisasi. Begitu juga pada tingkat nasional dan lokal menjadi keharusan untuk mengikutinya.

Dengan terjadinya perubahan-perubahan kebijakan dan politik pendidikan sejak 1970-an dan peluang-peluang baru seperti diisyaratkan dalam paradigma baru pendidikan nasional, kini lembaga-lembaga pendidikan islam memiliki peluang dan sekaligus tantangan berkenaan dengan jenis dan model

pendidikan yang dapat dipilih dan diselenggarakan.

Modernisasi pendidikan islam (baik madrasah, pesantren, atau sekolah) sudah menjadi keharusan sejarah. Sejak dasawarsa terakhir abad 20, muncullah sekolah-sekolah islam swasta yang dalam perkembangannya disebut sebagai “sekolah islam plus”, “sekolah islam unggulan”, dan bahkan “sekolah elit

Islam/Muslim”, seperti Sekolah Islam al-Azhar, al-Izhar, Muthahhari, Insan Cendekia, Dwiwarna, Sekolah Madania, dan banyak lagi. Lembaga-lembaga pendidikan islam unggulan ini juga mengonsep terhadap wacana demokratisasi, civil society, serta multikultural dalam pendidikan yang berafiliasi dibawah masyarakat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmuni, Y. (1998). Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam. *Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- Baidhawiy, Z. (2014). Pendidikan Agama Islam Untuk Mempromosikan Perdamaian Dalam Masyarakat Plural. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman.* <https://doi.org/10.1063/1.2139503>
- Burhanuddin, J., & Afrianty, D. (2006). *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia.*
- Indonesia, T. P. K. B. B. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia.* Balai Pustaka.
- Mahfud, C. (2013). *Pendidikan multikultural.*
- Mukaromah, N. (2018). Dinasti Abbasiyah: Metode dan Materi Pendidikan Dasar (Kuttab). *Tarbawi: Jurnal Studi Pendidikan Islami*, 5, 1–12.
- Mulkhan, A. M. (2005). *Kesalehan Multicultural Ber-Islam Secara Autentik-Kontekstual di Aras Peradaban Global, Pusat Study Agama Dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah.* Jakarta Pusat.
- Nata, A. (2004). *Sejarah Pendidikan Islam: Pada Periode Klasik dan Pertengahan.* Rajagrafindo.
- Nata, A. (2016). *Tafsir ayat-ayat pendidikan (tafsir al-ayat Al-Tarbawiy).*
- Prasetyo, H., & Munhanif, A. (2002). *Islam & civil society: pandangan Muslim Indonesia.* Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan PPIM-IAIN Jakarta.
- Rusli, N. (1999). *Konsep ijtihad al-syaukani: relevansinya bagi pembaharuan hukum islam di indonesia.* Logos.
- Salam, B. (2002). *Pengantar Pedagogik (dasar-dasar ilmu mendidik).*
- Suryadi, A., & Tilaar., H. A. R. (1994). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar.* PT Remaja Rosdakarya.
- Tamin AR, Z., Purnamasari, N. I., Adityawati, I. A., Mo'tasim, M., Alim, Z., Chasanah, A. N., Abdullah, A., Ismail, M., & Nasucha, J. A. (2018). *Politik pendidikan: konsep dan praktik kebijakan pendidikan di Indonesia.* Dwiputra Pustaka Jaya Sidoarjo.
- Wajdi, M. B. N. (2015). Pendidikan ideal menurut Ibnu Khaldun dalam muqaddimah. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 13(2), 226–235.